

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Daring Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa Tenggara)

Gio Chandra Gobel¹
Ronny Gosal²
Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Dalam penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui implementasi kebijakan melalui proses komunikasi terhadap pelaksanaan pendidikan berbasis daring dimasa pandemi covid-19; Untuk mengetahui implementasi kebijakan melalui sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia terhadap pelaksanaan pendidikan berbasis daring dimasa pandemi covid-19; Untuk mengetahui implementasi kebijakan melalui stuktur birokrasi terhadap pelaksanaan pendidikan berbasis daring dimasa covid-19 dan Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam menangani kendala jaringan internet. Dasar dari penentuan kebijakan pemerintah dalam menerapkan metode daring yakni melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran CoronaVirus (Covid–19) kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Nomor 421 Tahun 2020 Tentang Panduan Guru dalam Penyelenggaraan Pembelajaran dimasa Pandemi Covid–19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengacu pada George C. Edward III Dalam H.I. Nawawi, 2017 : 135) yakni menekankan pada empat faktor : Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi dan Faktor Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian didapati bahwa sebagian besar actor implementor di lapangan telah mengerti dan beradaptasi dalam menerapkan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan berbasis dari di masa pandemic khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendidikan, Daring

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Masalah pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang cukup mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah terutama pada masa menghadapi Pandemi Covid 19. Oleh karena itu untuk mengatasi kondisi pendidikan yang kian hari kian memburuk maka pemerintah lewat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang strategis. Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan didunia pendidikan adalah dengan mengandalkan bantuan teknologi seperti yang telah dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (2020) dalam Jumpa Persnya di Jakarta.

Sampai saat inipun dalam mengatasi masalah pendidikan maka pandemi covid-19 telah menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan kreativitas bagi para guru dan murid terhadap masalah dunia pendidikan. Penggunaan teknologipun masih diperhadapkan pada masalah untuk mengakses dunia informasi misalnya guru memberikan mata pelajaran lewat daring yang harus benar-benar difahami oleh murid apalagi para murid yang belum memahami perangkat komunikasi lewat media internet, karena masuk melalui daring setiap murid harus memahami betul pada saat jam hari dan kapan dilakukan proses pembelajaran.

Dalam mengakses pengetahuan melalui proses pembelajaran para guru tentu harus dibekali dengan pengetahuan memadai baik untuk memahami internet sehingga dengan pemberian mata pelajaran kepada murid harus benar-benar dapat di pahami oleh setiap murid. Kalau seorang guru dan murid untuk masuk didunia apalagi dengan metode daring yang masih dianggap baru tentu harus membutuhkan pengetahuan ekstra apalagi masuk melalui zoom. Selain itu dengan keterbatasan waktu apabila hanya diberikan batas dalam dua jam misalnya tentu tidak semua mata pelajaran yang

mampu diberikan oleh guru yang sisanya untuk membagi waktu agar siswa tetap aktif belajar dirumah terpaksa harus memberikan tugas. Hal ini tentu akan menjadi salah satu kendala dalam proses pendidikan, walaupun diberikan tugas kepada murid semacam tugas pekerjaan rumah lalu siapa yang harus memberikan pengawasan kepada muridnya untuk belajar. Terpaksa dalam hal menangani masalah tersebut tentu diberikan peran kepada orang tua murid, sedangkan salah satu masalah yang dihadapi oleh orang tua murid adalah keterbatasan pengetahuan dan wawasan terhadap penguasaan mata pelajaran. Hal ini tentu akan menjadi salah satu dilema dalam meningkatkan mutu pendidikan apalagi bagi murid yang baru menempuh pendidikan dasar. Selain itu dalam menstransfer pendidikan lewat pembelajaran tentu cara pemberian melalui metode daring sangat berbeda sekali ketika para murid dan guru saat dikelas.

Dasar dari penentuan kebijakan pemerintah dalam menerapkan metode daring yakni melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran CoronaVirus (Covid-19) kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Nomor 421 Tahun 2020 Tentang Panduan Guru dalam Penyelenggaraan Pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19, oleh karena itu dasar dari beberapa kebijakan tersebut diatas maka akan menjadi salah satu dasar yang sangat penting dalam implementasi kebijakan sebab berbicara tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah adalah merupakan suatu upaya atau cara pemerintah daerah dalam memberikan transformasi pengetahuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III 1980 (Dalam H.I. Nawawi, 2017 : 135) dimana setiap implementasi kebijakan akan dapat berhasil dengan baik apabila menganut

empat variable kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor ini menurut Edwards III secara simultan dapat berhubungan antara satu dengan lainnya. Dari keempat variabel tersebut maka penulis dapat mengaplikasikannya kedalam dunia pendidikan khususnya melalui pendidikan dasar pada keempat sekolah, dimana keempat masalah yang disebutkan diatas menjadi salah satu masalah dalam penentuan implementasi kebijakan. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan penulis mengambil pokok masalah dalam penggunaan metode daring khususnya dalam proses belajar mengajar.

Tinjauan Pustaka
Konsep Implementasi Kebijakan

Variable yang dapat dikemukakan oleh George C. Edwards III 1980 (Dalam H.I. Nawawi, 2017 : 135) terhadap Implementasi kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Komunikasi.
 Dalam variable komunikasi yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan maka ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasan, (2) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan (3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Sumberdaya.
 Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materil dan metoda.
- c. Disposisi
 Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementasi kebijakan yang baik harus memiliki disposisi yang baik

- d. Struktur Birokrasi.
 Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005:150), 23 "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno

(2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

Penelitian Terhadap

Venny Ria Ngongoloy, Marthen Kimbal, Welly Waworundeng: Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan: Infrastruktur berperan penting dalam memudahkan masyarakat setiap hari dalam melakukan aktifitas, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai bisa memberikan keberhasilan dalam suatu proses upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelayanan publik yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi. Pembangunan infrasturuktur salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun informan yang dipilih oleh Peneliti adalah :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Kepala-Kepala Sekolah (4 Orang)
4. Guru (3 Orang)

5. Orang Tua / Wali Murid (3 Orang)

Pembahasan

4.4.1 Aspek Komunikasi

Menurut George C. Edward III Dalam H.I. Nawawi, 2017 : 135) Dalam variable komunikasi yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan maka ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasan, (2) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan (3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Ketiga konteks tersebut menjadi aspek pendukung berhasilnya suatu kebijakan dilapangan. Transmisi merupakan indikator implementasi kebijakan dilapangan dalam penyampaian isi serta maksud dari produk kebijakan. Transmisi juga dapat memberikan feedback bagi penerima kebijakan karena ada nilai yang akan diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan indikator kejelasan pelaksanaan kebijakan dilapangan. Kejelasan penyampaian isi kebijakan adalah indikator berhasilnya suatu kebijakan, karena berkaitan dengan maksud kebijakan itu untuk apa. Apakah kebijakan itu mampu mengatasi masalah dilapangan atau sebaliknya.

Dan terakhir adanya konsistensi kebijakan. Indikator konsistensi menjadi penting karena akan mendapatkan nilai bagi penerima kebijakan. Apakah kebijakan itu mampu bertahan mengatasi masalah atau kebijakan itu hanya menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu aspek Komunikasi penting dalam penentuan kebijakan dilapangan. Dari hasil penelitian dilapangan, dinas pendidikan Minahasa Tenggara Komunikasinya terstruktur pertama mereka mengikuti himbuan pemerintah pusat, lalu berkoordinasi dengan bupati serta sekolah-sekolah. Bentuk komunikasi adalah menyampaikan kepada sekolah-sekolah agar menerapkan kebijakan pendidikan berbasis daring, itu dilakukan dalam surat edaran tentang pendidikan

daring di masa pandemi. Oleh sebab itu dengan adanya komunikasi yang terstruktur mampu menghasilkan metode belajar yang inovatif dan aplikatif. Pertama secara inovasi pemerintah daerah membentuk sekolah bangsawan yang dimaksudkan untuk mengcover kondisi infrastruktur sekolah atau lokasi murid yang memadai dan metode ini mampu memberikan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Terbukti dengan adanya laporan kegiatan belajar luring.

Kedua dari pendekatan aplikatif, pendekatan tentunya merupakan metode pembelajaran daring lewat media zoom dan google meet. Memang pendekatan ini masi belum terlalu baik karena masalah koneksi internet dan siswa yang belum semua paham soal daring, namun pada fokus pembahasan ini dilihat secara komunikasi maka menurut hemat berpikir peneliti komunikasi yang dilakukan sudah baik karena mampu merangkul siswa untuk tetap produktif dalam belajar di masa pandemi Covid-19.

4.4.2 Aspek Sumber Daya

Dalam pengertian umum, sumber daya diartikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomis. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Dalam literatur ekonomi sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. Ensiklopedia Webster yang dikutip oleh Fauzi pada tahun 2004, misalnya mendefinisikan sumber daya antara lain sebagai: Pertama Sumber Daya adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, baik itu berkaitan dengan masalah atau kemampuan manajerial. Kedua Sumber Daya sebagai bentuk persediaan, penunjang atau bantuan. Dan Terakhir Sumber Daya adalah merupakan sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Lebih spesifik Rees dalam (Fauzi, 2004) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada

pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya dan yang kedua adalah harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut.

Dari pengertian tersebut telah menggambarkan bahwa Sumber Daya juga menjadi salah satu tolak ukur penentuan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Dalam konteks penelitian ini maka poinnya adalah bagaimana kemampuan sumber pemerintah daerah Minahasa Tenggara di bidang pendidikan dalam pelaksanaan metode belajar daring di masa pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa peneliti mendapatkan data keterangan dari semua informan mengatakan rata-rata tenaga pendidik mampu memahami metode belajar daring. Sebagai contoh di SMA N. 1 Belang, rata-rata tenaga pendidik masi dalam kalangan generasi muda yang pada dasarnya paham perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi. Mereka tidak mengalami masalah soal penggunaan metode belajar daring.

Namun disisi lain kendala dalam aspek sumber daya hanya berasal dari belum meratanya jangkauan akses internet sehingga jika listrik padam maka internet juga ikut mati. Ini salah satu kendala dalam proses belajar daring. Selain itu juga masi ada Sekolah dasar yaitu SD Impres Buku yang belum stabil koneksi internetnya, menyebabkan proses belajar daring tidak maksimal, namun kondisi ini langsung disikapi pihak sekolah dengan proses pembelajaran luring atau sekolah bangsawan. Metode ini cukup mampu mengatasi masalah kondisi koneksi internet yang belum stabil. Tentunya dengan metode ini siswa masi tetap melaksanakan proses belajar walaupun terbatas. Pada hal disisi lain dinas kominfo telah mengatakan di tahun 2021 mereka telah mendirikan 4 tower dari jenis provider yang berbedah dan salah satunya ada di Kecamatan Belang yang tak lain Desa Buku ada di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Itu dilakukan untuk menunjang proses belajar daring. Namun upaya tersebut belum mampu memberikan koneksi internet yang stabil bagi SD Impres Buku.

Disisi lain juga mengenai kuota internet dari hasil wawancara dinas pendidikan memberikan kuota internet 12 GB untuk Guru dan 10 GB untuk Siswa. Namun setelah ditanya kepada siswa mereka justru menggunakan kuota mandiri. Pada sisilain guru mengatakan mereka menerima namun hanya pada saat covi-19 ada dan saat ini sudah tidak menerima. Kondisi ini tentu menjadi faktor juga dalam menunjang pembelajaran dimasa pandemi. Namun menurut hemat berpikir peneliti saat ini semua serba instan dan cepat sehingga jika permasalahan hanya dipandang dari sisi sempit maka itu tidak terlalu penting.

Menurut hemat berpikir peneliti yang lebih esensial dari aspek sumber daya adalah soal kemampuan pemerintah daerah Minahasa Tenggara memastikan tenaga pendidik paham metode belajar daring dan siswa mengerti cara penggunaannya. Serta memastikan kondisi internet itu tercover semua wilayah. Ini adalah poin paling penting dalam aspek sumber daya dalam konteks kegiatan pembelajaran daring saat dimasa pandemi Covid-19. Karena Impelementasi Kebijakan akan berhasil jika Sumber Daya dilapangan memadai.

4.4.3 Aspek Disposisi

George C. Edward III Dalam H.I. Nawawi, 2017 : 135) mengatakan Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementasi kebijakan yang baik harus memiliki disposisi yang baik maka dia akan menjalankan proses kebijakan yang baik pula.

Pada dasarnya secara konteks umum Disposisi merupakan istilah dalam administrasi perkantoran yang berhubungan dengan surat menyurat. Disposisi adalah lembar perintah dan instruksi atasan kepada bawahan disertai tingkat urgensinya. Biasanya dalam administrasi perkantoran ada semacam surat perintah dari atasan untuk segera ditindaklanjuti oleh bawahan secepat

mungkin. Ini biasanya bersifat petunjuk untuk melakukan suatu hal.

Dalam konteks penelitian ini maka disposisi yang akan peneliti bahas mengarah pada tindakan atau arahan pemerintah daerah kepada satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. Satuan kerja perangkat daerah yang dimaksud adalah dinas pendidikan dan dinas komunikasi dan informasi Minahasa Tenggara. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam memberikan pelayan di bidang masing-masing pada saat pandemi covid-19.

Dalam penelitian ini fokusnya adalah siapa yang memberikan arahan dalam Implementasi Kebijakan pendidikan daring, dan lalu siapa yang mengawasasinya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dinas pendidikan melalui kepala bidang menyampaikan bahwa Arahan Implementasi Kebijakan adalah *"Pertama ada bupati, yang dituangkan dalam bentuk surat edaran yang dibuat oleh dinas pendidikan, surat edaran tersebut memuat tentang himbau pembelajaran daring dan luring di sekolah-sekolah"* (Kabid Pendidikan) Selanjutnya dari Kominfo mengatakan *"Kami menunggu arahan dari pemimpin daerah lalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta provider"* (Kadis Kominfo).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dinas menunggu perintah dari Bupati dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis daring. Menurut hemat berpikir peneliti hal itu sudah baik. Kondisi ini tidak mengalami masalah dilapangan. Pada prinsipnya menurut peneliti aspek Disposisi telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Minahasa Tenggara dalam melaksanakan proses belajar daring dan luring, ini adalah contoh baik bagi daerah lain di Sulawesi Utara.

Dasar peneliti menyampai sudah baik, karena saat peneliti mengambil data baik primer dan sekunder, tidak dijumpai hal-hal yang bermasalah pada aspek Disposisi. Melainkan dari aspek ini, menurut peneliti Pemerintah Daerah

dalam hal Bupati sangat produktif memberikan arahan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk menyikapi proses belajar daring yang bermasalah dengan menggantikan dengan proses belajar luring atau sekolah bangsawan dan ini didengarkan dan kerjakan dengan baik oleh sekolah-sekolah Di Minahasa Tenggara. Bupati juga bertindak sebagai pengawas dalam Penerapan Kebijakan Dilapangan.

4.4.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005:150), 23 "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar

pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

Standar Operasional Prosedur merujuk pada mekanisme setiap organisasi dalam memberikan pelayanan. Dinas pendidikan adalah fokus utama dalam memastikan bahwa proses belajar daring itu berhasil. Dalam penelitian ini maka SOP yang dimaksud adalah mekanisme Implementasi Kebijakan berbasis daring. Oleh sebab itu pembahasan ini akan melihat bagaimana Mekanisme Implementasi Kebijakan berbasis daring di Minahasa Tenggara khususnya di 4 Sekolah dalam fokus penelitian.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan daring telah tertuang dalam Surat Edaran No. 421.2 / 420 / 477. Tentang Panduan Guru Dalam Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam surat edaran tersebut setidaknya menjelaskan 3 poin inti tentang mekanisme pembelajaran daring sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan kesiapan lokasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selain dilaksanakan disekolah
2. Membuat rencana kerja kegiatan
3. Guru-guru menjalankan ide kreatif bupati selain kegiatan belajar daring maka dilakukan kegiatan belajar bangsawan dengan mengunjungi rumah penduduk yang memiliki teras rumah, halaman yang luas.

Berdasarkan ketiga poin tersebut dan hasil penelitian dilapangan semua telah dilakukan dengan baik oleh Dinas

Pendidikan dan sekolah-sekolah. Guru-guru melaksanakan metode pembelajaran daring dan luring atau sekolah bangsawan. Mereka melaksanakan dengan baik dilapangan. Bahwa untuk menjamin jalannya kegiatan kerja-kerja pemerintahan di bidang pendidikan, dinas pendidikan selalu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terkait dengan proses pembelajaran daring dan luring.

Secara teknis sekolah-sekolah mengadakan rapat melalui rapat musyawarah antar kepala sekolah dan hasilnya di laporkan kepada dinas pendidikan. Sebagai upaya kontrol dari dinas terkait dengan proses belajar, guru-guru memposting di media sosial Facebook dan Group WhatssApp tentang proses pelaksanaan belajar baik daring maupun luring.

Menurut hemat berpikir peneliti ini adalah cara yang baik, karena menghindari kerumunan serta mampu produktif walaupun di masa pandemi. Pemanfaatan media sosial juga adalah hal baik karena Kepala Daerah dapat memantau jalannya kegiatan belajar tanpa bertemu langsung. Maka secara keseluruhan menurut peneliti hal dari aspek struktur organisasi dalam hal ini dinas pendidikan mampu menggerakkan dan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan pembelajaran daring tetap produktif walaupun di masa pandemi Covid19.

Penutup

Kesimpulan

1. Dari Aspek Komunikasi bahwa pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan, mampu menyampaikan dan melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Kegiatan Pembelajaran Daring. Dinas Pendidikan mampu berkomunikasi menyampaikan isi serta maksud dari surat edaran No. 421.2 / 420 / 477. Tentang Panduan Guru Dalam Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kepada sekolah-sekolah. Tindakan

tersebut mampu memberikan inovasi pendidikan berbasis Sekolah Bangsawan sebagai wujud dalam mengantisipasi kondisi infrastruktur sekolah yang belum memadai agar tetap produktif walaupun dimasa pandemi Covid-19.

2. Dari Aspek Sumber Daya bahwa secara umum kapasitas sumber daya tenaga pendidik sebagian besar mampu memahami kondisi metode pembelajaran daring baik melalui zoom dan google meet. Namun karena kondisi infrastruktur jaringan belum memadai sehingga masi menjadi kendala dalam menunjang kegiatan belajar lewat daring.
3. Dari Aspek Disposisi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan sebagai SKPD Utama yang diberi wewenang menjalankan kebijakan pendidikan berbasis daring mampu menerapkan setiap arahan dan petunjuk Bupati mengenai pendidikan berbasis daring dan luring/sekolah bangsawan di 4 sekolah dalam fokus penelitian ini.
4. Dari Aspek Struktur Birokrasi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, dinas komunikasi dan informatika mampu mengarahkan mekanisme kegiatan belajar daring di sekolah-sekolah. Hal itu terbukti dengan adanya data laporan pembelajaran daring dari sekolah SMA N. 1 Belang dan SD Impres Buku. Serta dinas selalu berkoordinasi dengan pihak kepala-kepala sekolah mengenai proses pembelajaran daring dan luring.

Saran

1. Aspek Komunikasi. Dinas Pendidikan dibantu Dinas Kumunikasi dan Informatika, bahwa Isi kebijakan harus di komunikasikan kepada pemerintah tingkat Desa dan Kelurahan agar pemerintah tingkat Desa atau Kelurahan dapat membantu menyampaikan kepada orang tua murid dimana Desa itu belum tercover jaringan internet.

2. Dari Aspek Sumber Daya. Secara umum tenaga pendidik di Minahasa Tenggara mampu memahami Metode Belajar Daring, namun kondisi infrastruktur jaringan yang belum baik perlu di tingkatkan, apalagi jangkauan koneksifitas internet.
 3. Dari Aspek Disposisi. Pemerintah daerah serta dinas terus melakukan kerja-kerja pemerintahan dibidang pendidikan dengan melibatkan pihak sekolah-sekolah. Agar pihak sekolah dapat memberikan masukan akan keputusan-keputusan yang diambil.
 4. Dari Aspek Struktur Birokrasi. Seorang pelaksana kebijakan sebagai implementator harus terus berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah agar agar setiap masalah dibidang pendidikan khususnya saat pendidikan daring mampu dikerjakan secara kolektif. Kedua dinas perlu menggerakkan bawahan agar terus mengontrol dan memastikan jalannya kegiatan pembelajaran dilapangan.
- Daftar Pustaka**
- Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Budiyanto 2017 *Penyebab Rendahnya Pendidikan*, di Pulau Terluar, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Edwar, Ill 1980. *Implementasi Publik Policy*. Wangshington DC : Congressional Quarter Press.
- Fernandes Simanngunsong 2017, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit IPDN Press- Jatinangor
- Franciscus Van YLST, 2014, *Mengenal Ilmu Pendidikan*, Penerbit Yayasan Dian Desa Jakarta.
- Franklin 2020 *Pendidikan berbasis Daring*, Penerbit BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Hadari .I. Nawawi,2017 , *Jaring-jaring Pemerintahan*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.
- Hamid Darmadi, 2018, *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi, Konsep Dasar Teori, Strategi dan Implementasi dalam Pendidikan Globalisasi*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.
- Harun Adhmad 2017, *Jendela Pengantar Pendidikan*, ISBN=978-623=275-491-1
- Haryanto 2014, *Mengenal Dunia Pendidikan*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Heidjrachman dan Husnah 2017, *Pengantar Pendidikan* Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- Horne. H 2015, *Memahami Pendidikan Karakter*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Moleong Lexy. L.J. 2010:5 , *Metodologi Penelitian Kualitatif* Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Muhadam Laboro 2019, *Memahami Ilmu Pemerintahan ,Suatu Teori, Konsep* Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Muhibbin Syah 2014, *Dunia Pendidikan di Era Globalisasi*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Notoadmodjo 2003, *Mengenal Dunia Pendidikan*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Petrus Polyando 2016, *The Government Of Self And Others, Terjemahan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Nusantara*.
- Poerwadarminta W.J. S, 2014 , *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Penerbit Balai Pustaka Nasional Jakarta.
- Venny Ria Ngongoloy, Marthen Kimbal, Welly Waworundeng: *Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan*. Jurnal FISIP UNSRAT